



Terkait Tupoksi, Kejagung dan BRI Tanda Tangan MoU

BeritaNasional.ID - , JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) tentang kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kerjasama tersebut di wujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo dan Direktur Utama PT BRI Suprajarto, di lanjutkan perjanjian kerja sama yang di tandatangani oleh para Jaksa Agung Muda, Plt Kaban Diklat dan para Direktur PT. BRI (Persero) dan Nota Kesepakatan satuan kerja wilayah/ daerah di tandatangi oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan Wilayah PT. BRI (Persero) berlangsung di

Aula Sarana Pradana, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (31/05/17).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan, nota kesepakatan dan kerjasama ini dilakukan dengan dilandasi komitmen adanya kepentingan serta kehendak bersama untuk membangun hubungan kerjasama sinergis, sesuai visi dan misi, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi masing-masing yang perlu dilakukan secara bersama saat dibutuhkan.

“Ini dilakukan guna menopang dan mendukung agar program dan kebijakan operasional perbankan serta target yang hendak dicapai, khususnya dilingkungan BRI, dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan optimal. Untuk hal itu tidak mustahil perlu didampingi dan dijaga melalui penanganan dan penyelesaian secara hukum oleh aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas serta kompetensi,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, kesadaran dan pemahaman seperti ini dapat tetap dibangun dan dijaga secara berkelanjutan, meskipun antara lembaga kejaksaan dan perbankan memiliki wilayah tugas, fungsi dan sistem kerja yang tidak sama, namun dalam hal yang berkaitan dengan tekad dan tanggung jawab, obsesi serta tujuan menyukseskan pembangunan nasional guna meningkatkan kehidupan bangsa, mewujudkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik, semuanya harus memiliki persepsi dan semangat yang sama.

Selain itu, lanjutnya, berkenaan dengan berbagai implikasi dan permasalahan hukum yang kemungkinan bahkan tidak jarang bisa terjadi tersebut, Kejagung sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara bukan hanya di bidang

Penuntutan tetapi juga kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, selalu akan menerima dan menyediakan diri setiap permintaan dari lembaga pemerintah manapun yang memerlukan bantuan dan berkehendak menjalin kerjasama di bidang hukum dan penegakan hukum.

“Oleh karena itu, baik Kejagung maupun BRI setelah terjalinnya hubungan kerjasama secara formal nanti haruslah memiliki komitmen dan pandangan yang sama dan saling melengkapi dalam menghadapi dan menangani setiap masalah yang memerlukan pemecahan bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BRI, Suprajarto mengatakan, nota kesepakatan ini untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan kedepan.

Menurutnya, dengan kerjasama ini dapat diyakini bahwa PT BRI dan Kejagung akan semakin solid dalam mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum yang tentunya akan semakin meningkatkan kinerja BRI dan Kejagung kepada masyarakat.

“Agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, tujuan kerjasama ini adalah untuk Pengawasan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), pertukaran data dan informasi serta optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam atau luar negeri. Kemudian terkait peningkatan SDM baik di BRI atau di Kejaksaan Agung sendiri. Kerjasama ini juga meliputi pengamanan penyediaan dan penggunaan jasa perbankan. MoU antara PT BRI dan Kejaksaan Agung ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama. (bernas-cyberpost.co.id/)